

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Bangkalan adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Disisi lain, masalah pelayanan perparkiran menjadi sangat penting terutama berkaitan dengan penanganan ketertiban oleh petugas pemungut/juru parkir.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Ditinjau dari sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah salah satu yang potensial adalah sektor jasa perparkiran. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat karya ilmiah dengan judul Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Bangkalan.

Perkembangan Bangkalan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang menyebabkan tingkat kepemilikan kendaraan semakin meningkat dapat mempengaruhi terhadap pemilik kendaraan bermotor yang menginginkan kemudahan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dan ditambah lagi dengan perilaku pengendara bermotor yang tidak disiplin, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berakibat kemacetan dan keadaan semrawut.

Keadaan di atas di lihat dari satu sisi menjadi suatu tantangan bagi pemerintah untuk mengelola sistem pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, akan tetapi keadaan tersebut juga memberi peluang bagi pemerintah menambah pendapatan asli daerah melalui pungutan atau retribusi kendaraan bermotor di sektor parkir. Peran pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut menjadi suatu tuntutan kewajiban untuk memberi jalan keluar terbaik bagi masyarakat, apalagi sistem pungutan parkir selama ini dinilai banyak terjadi kegagalan mulai dari kecocoran keuangan hasil pungutan parkir, pelayan petugas juru parkir buruk, hingga pada persoalan fasilitas tempat parkir yang tidak wajar.

Kemampuan pelaksana kebijakan retribusi parkir, melibatkan dua pihak yang saling berhubungan. Organisasi pelayanan publik yang menyediakan jasa publik dan masyarakat sebagai pemanfaatan pelayanan publik di pihak lain. Oleh karenanya keberhasilan implementasi kebijakan parkir sangat ditentukan oleh hubungan kedua pihak atau dengan kata lain bahwa dalam implementasi kebijakan parkir, kemampuan pelaksana adalah kemampuan mengelola jasa perparkiran secara efisien dan efektif. Struktur birokrasi yang dimaksud adalah struktur kelembagaan yang mendukung terlaksananya kebijakan sehingga tidak ada yang merasa dipersulit dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dan batasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin di capai dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi DISHUBKOMINFO
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya.
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif SKPD atas Pemungutan Retribusi Parkir berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Penulis
 - a. Mengetahui Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Bangkalan.
 - b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Bagi Pihak Lain

Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulisan lain yang akan mengembangkan penulisan dalam kajian Mekanisme Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jalan RE. Marta dinata No.07 Kabupaten Bangkalan Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11-01-2016 Sampai 19-02-2016.